

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 7A UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945 DALAM PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU  
WAKIL PRESIDEN**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum  
dengan Kekhususan HTN/HAN**



**Disusun Oleh :**

**SUROSU**

**NIM. 2011-20-009**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MURIA KUDUS  
2015**

## HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 7A UNDANG-UNDANG  
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 DALAM  
PEMAKZULAN PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

### SKRIPSI

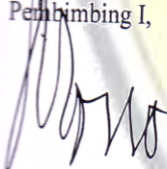
Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
dalam menyelesaikan Jenjang Strata 1 (S1) Ilmu Hukum  
dengan Kekhususan Hukum HTN/HAN

Disusun Oleh :

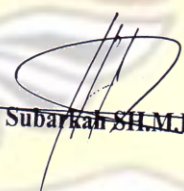
**SUROSO**

NIM. 2011 - 2 0 - 009

Disetujui,  
Pembimbing I,

  
Sumono SH.MH

Pembimbing II,

  
Subarkah SH.M.Hum

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UMK

  
Dr. Sukresno SH.M.Hum

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUROSO

Nim : 2011 – 20 – 009

Alamat : Ds. Hadiwarno Rt 04/03, kec. Mejobo, Kab. Kudus

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dengan arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas penulis mencantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran skripsi yang saya buat ini, maka saya bersedia menerima segala sanksi yang di berikan, sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 15 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,



( SUROSO )

## HALAMAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

1. Nalar hanya akan membawa kita dari A menuju B, namun imajinasi mampu membawa kita dari A ke manapun. .... Albert Einstein
2. Hukum itu pola pikir dan pola rasa

### Ku persembahkan untuk :

- 1 Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 2 Saudara-Saudaraku yang kucintai.
- 3 Sahabat- sahabatku *agent of change* dari organisasi INTERNAL kampus; BEM FH UMK, BEM UMK yang selalu mencintai perubahan, keadilan dan kebenaran.
- 4 Sahabat-sahabatku *agent of change* dari organisasi EKSTERNAL kampus; PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Komisariat Sunan Muria maupun PMII seluruh Nusantara yang selalu mencintai perubahan, keadilan dan kebenaran.
- 5 Sahabat-sahabatku Fakultas Hukum khususnya angkatan tahun 2011 semoga angkatan ini menjadi generasi perubahan bangsa yang lebih baik.
- 6 Almamaterku.
- 7 Tanah airku Indonesia



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, terlebih dahulu penulis memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan kesehatan dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam proses perkuliahan hingga pada penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak menerima dukungan dari berbagai pihak, untuk itu melalui kesempatan ini perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung penulis dalam studi selama ini. Teristimewa, ucapan terima kasih dan penghargaan ini penulis sampaikan secara khusus kepada, yang terhormat :

1. Bapak Dr. Suparno, SH. MS selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan bantuan dukungan secara moral maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak Kristiyanto, SH.MH selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah menyetujui judul skripsi ini.
4. Bapak Sumono, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing skripsi ini dari sejak persiapan sampai akhir.
5. Bapak Subarkah, SH. MHum selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing skripsi ini dari sejak persiapan sampai akhir.
6. Semua Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah membantu penulis dalam menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

7. Kepada sahabat-sahabat dari organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muria Kudus yang telah memberikan dukungan dan pembentukan karakter diri (*soft skill*) terbaik yang saya miliki, sehingga dapat berguna menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua pihak yang telah bersedia membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, baik moriil maupun materiil.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif, Penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 15 Februari 2015

P e n u l i s

Suroso

## ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Ketentuan Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dalam Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang waktu terjadinya pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia yang melibatkan beberapa lembaga Negara.

Guna mencapai tujuan tersebut diatas, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Dalam hal teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan data sekunder. Setelah data diperoleh, maka penulis menyusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas, kemudian disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa terjadinya pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia dalam masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal tersebut diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia melibatkan beberapa lembaga Negara yaitu Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga pengusul, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pemeriksa, mengadili dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat serta Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi. Dimana usulan pemakzulan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat harus memenuhi syarat berupa dukungan 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dan minimal di hadiri 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga yang melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia harus di hadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.

**Kata Kunci** : *Pemakzulan, Presiden dan/atau Wakil Presiden.*

## **DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Pernyataan Bebas Plagiarisme</b> .....	iii
<b>Halaman Persembahan</b> .....	iv
<b>Kata Pengantar</b> .....	v
<b>Abstrak Skripsi</b> .....	vii
<b>Daftar Isi</b> .....	viii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Impeachment Dan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden...	13
1. Pengertian Impeachment.....	13
2. Pengertian Pemakzulan.....	14
B. Persyaratan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Dakwaan Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.....	15
C. Kewajiban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat.....	20



D.	Kewajiban Majelis Permusyawaratan Rakyat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.....	27
----	--	----

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A.	Metode Pendekatan.....	31
B.	Spesifikasi Penelitian.....	32
C.	Metode Pengumpulan Data.....	32
D.	Metode Pengolahan Dan Penyajian Data.....	34
E.	Metode Analisis Data.....	35

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Terjadinya pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia .....	36
1.	Pengkhianatan Terhadap Negara.....	36
2.	Korupsi Dan penyuapan.....	39
3.	Tindak Pidana Berat Lainnya.....	41
4.	Perbuatan Tercela.....	42
5.	Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.....	42
B.	Mekanisme Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Republik Indonesia.....	44

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59

## **DAFTAR PUSTAKA**

